

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kebijakan Fiskal

1. Definisi Kebijakan Fiskal

“Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi.”¹ Atau dapat juga dikatakan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Menurut Zaini Ibrahim, “Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah”.²

Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijakan fiskal yang berupa pengurangan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan

¹Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Ed. 1, Cet. 2, hal. 1

²Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten: Banten, 2013), Cet. 1, edisi Revisi, hal. 193

dapat mengurangi permintaan total, sehingga inflasi dapat ditekan.³

Menurut Rozalinda, “Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.”⁴

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan pemerintah yang di dalamnya terdapat peraturan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam menjaga kegiatan ekonomi yang diinginkan atau kondisi yang lebih baik.

Adapun instrument dalam kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.

1. Belanja/pengeluaran negara ($G = \textit{government expenditure}$)
2. Perpajakan ($T = \textit{taxes}$)

Kebijakan fiskal juga bisa dikatakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang sangat penting dalam rangka:

1. Membantu memperkecil fluktuasi dari siklus usaha
2. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang *sustainable*, kesempatan kerja yang tinggi
3. Membebaskan dari inflasi yang tinggi atau bergejolak.

Pada dasarnya pemerintah harus menjadi panutan bagi masyarakat. Pemerintah haruslah berbelanja sesuai dengan

³Noripin, *Ekonomi Moneter, Buku II* (BPFE-Yogyakarta: Yogyakarta, 1987), Ed. 1, Cet. 1

⁴Rozalinda, *Ekonomi Islam: (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*, (PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2015), Ed. 1, Cet. 2, hal. 137

pendapatan. Keadaan inilah yang dinamakan dengan anggaran belanja berimbang. Apabila belanja pemerintah melebihi penerimaan, sehingga mengharuskan pemerintah meminjam dari masyarakat atau mencetak uang baru. Tentu saja tindakan ini sangat tidak bijak. Zaman sekarang pemerintah di kebanyakan negara selalu berusaha agar belanjanya dalam keadaan seimbang. Anggaran belanja pemerintah selalu disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada masa tertentu. Apabila tingkat kegiatan ekonomi rendah dan terdapat banyak pengangguran, kemiskinan, musibah, dan lain sebagainya, pemerintah akan belanja yang melebihi pendapatannya. Keadaan inilah yang menimbulkan defisit anggaran. Akan tetapi, apabila perekonomian baik, kesempatan kerja penuh tercapai, kenaikan harga seimbang, belanja daerah dapat dihemat, sehingga pemerintah dapat melakukan *saving* terhadap pendapatannya. Keadaan inilah yang dinamakan dengan anggaran belanja surplus.

Perkembangan ekonomi di Banten tiap tahunnya mengalami kenaikan pendapatan. Namun jika dilihat dari pengeluarannya di tahun 2006 misalnya, pengeluaran pemerintah melebihi pendapatan yang diterima yang mengakibatkan terjadinya defisit anggaran hal ini terjadi karena penyimpangan dalam penggunaan anggaran di beberapa dinas contohnya dinas pendidikan yang menggunakan dana sebesar Rp. 7.3 Miliar digunakan untuk makan dan minum dan sebesar Rp. 571 juta digunakan untuk biaya pakaian, sedangkan biaya pemeliharaan gedung yang digunakan untuk keperluan

masyarakat hanya sebesar Rp. 43 juta. Hal ini jelas bahwa para pembuat kebijakan yang memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan APBD di Banten.

2. Tujuan Kebijakan Fiskal

Pada dasarnya, kebijakan fiskal bertujuan untuk memengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan jumlah seluruh produksi masyarakat, banyaknya kesempatan kerja dan pengangguran, tingkat harga umum dan inflasi, serta menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar.

Tujuan dari kebijakan fiskal menurut John F. Due, yaitu:

- 1) Untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi.
- 2) Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran), dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum.
- 3) Untuk menstabilkan harga-harga barang secara umum, khususnya mengatasi inflasi.

Dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan pada tujuan yang ketiga yaitu untuk menstabilkan harga-harga barang secara umum, khususnya mengatasi inflasi.

Jika harga-harga umum yang terus-menerus meningkatkan pada suatu saat dan tingkat tertentu hanya akan menguntungkan para pelaku bisnis. Jadi, bila harga-harga umum terus menunjukkan kenaikan yang tajam (menimbulkan inflasi) hanya akan menguntungkan segelintir pelaku bisnis dan

akan menyulitkan masyarakat, terutama bagi orang yang berpenghasilan tetap. Keadaan inflasi yang tidak terkendali pada akhirnya akan menjadi boomerang pada dunia usaha karena investasi produktif akan semakin berkurang. Berkurangnya investasi produktif ini terjadi sebagai akibat beralihnya investasi terhadap barang-barang yang tahan inflasi (*against inflation goods*) seperti tanah, tanah dan bangunan, dan logam mulia.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal membawa pengaruh bagi perekonomian. Adapun pengaruh-pengaruhnya, antara lain:

- 1) Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan-tujuan seperti inflasi yang rendah dan tingkat pengangguran yang rendah.
- 2) Berdasarkan teori Keynesian, kenaikan belanja pemerintah sehingga APBN mengalami defisit dapat digunakan untuk merangsang daya beli masyarakat ($AD = C + G + I + X - M$) dan mengurangi pengangguran pada saat terjadi resesi/depresi ekonomi.

Ketika terjadi inflasi, pemerintah harus mengurangi defisit (atau menerpakan anggaran surplus) untuk mengendalikan inflasi dan menurunkan daya beli masrakat.

Inflasi yang tinggi akan mempengaruhi kondisi perkembangan ekonomi Banten. Di tahun 2008 mengalami kenaikan cukup tinggi dan hampir melebihi kenormalan tingkat inflasi, hal ini di karenakan adanya kenaikan dari berbagai barang-barang seperti kenaikan gas, furniture, barang

elektronik, serta berkurangnya pasokan bahan makanan. Namun yang paling utama inflasi berasal dari komoditas bahan bakar gas, BBM, roko serta tarif listrik yang meningkat. Melihat hal ini pemerintah berupaya keras dalam menangani permasalahan tersebut dengan memberikan sumbangan-sumbangan subsidi pada barang-barang yang mengalami kenaikan harga sehingga inflasi dapat ditekan dan kembali normal lagi di tahun 2009.

3. Jenis-jenis Kebijakan Fiskal

Pada dasarnya, kebijakan fiskal terbagi menjadi dua. Pertama, kebijakan fiskal ekspansif (*expansionary fiscal policy*), yaitu kebijakan ini menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak netto. Kebijakan ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan ekspansif dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi dan pengangguran yang tinggi. Kedua, kebijakan fiskal kontraktif, yaitu suatu kebijakan dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi.

Secara teoritis dikenal empat jenis kebijakan fiskal, yaitu:

1) Pembiayaan fungsional (*The functional finance*)

Pembiayaan Fungsional adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Ada beberapa hal penting yang biasanya dilakukan oleh

pemerintah yang menganut pola pembiayaan fungsional ini, yaitu:

- a. Pajak bukan hanya difungsikan sebagai alat menggali sumber penerimaan, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk mengatur sektor swasta (*private sector*).
- b. Apabila terjadi inflasi yang berlebihan, biasanya untuk mendanai penarikan dana masyarakat, maka pemerintah melakukan pinjaman luar negeri.
- c. Apabila pencapaian target pajak dan pinjaman ternyata tidak cepat, maka pemerintah melakukan pinjaman dalam negeri bentuk percetakan uang.

2) Pendekatan anggaran terkendali (*the managed budget approach*)

Pendekatan anggaran terkendali adalah kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang mantap.

Dalam konsep ini, hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan penarikan pajak selalu di jaga. Kemudian untuk menghindari atau memperkecil ketidakstabilan ekonomi selalu diadakan penyesuaian dalam anggaran, sehingga pada suatu saat anggaran dapat dibuat defisit atau surplus disesuaikan dengan situasi yang dihadapi.

3) Stabilitas anggaran (*the stabilizing budget*)

“Stabilitas anggaran adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan

manfaat dari berbagai program.”⁵Tujuan kebijakan ini adalah agar terjadi penghematan dalam pengeluaran pemerintah.

Dalam stabilitas anggaran ini, pengeluaran pemerintah lebih ditekankan pada asas manfaat dan biaya relatif dari berbagai paket program. Pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja penuh. Dengan kata lain, berdasarkan stabilitas perekonomian yang otomatis, pengeluaran pemerintah ditentukan berdasarkan perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program. Sedangkan pengenaan pajak ditentukan untuk menimbulkan surplus pada periode kesempatan kerja penuh.

4) Pendekatan anggaran belanja berimbang (*balance budget approach*)

Pendekatan anggaran belanja berimbang adalah kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Selain itu juga untuk tercapainya anggaran berimbang jangka panjang.

Dengan kata lain, konsep anggaran berdasarkan pendekatan anggaran belanja berimbang menekankan pada keharusan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Ini berarti jumlah pengeluaran yang disusun pemerintah tidak boleh melebihi jumlah penerimaan yang didapat. Sehingga pemerintah tidak perlu berhutang, baik berhutang dari dalam negeri maupun keluar negeri.

⁵AniSri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, hal.9

4. Indikator Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakan dengan tujuan untuk mempengaruhi besar serta susunan permintaan agregat (khususnya permintaan swasta).

“Indikator yang biasa dipakai (meskipun kadangkala menyesatkan) untuk kebijakan fiskal ini adalah budget defisit, yakni selisih antara pengeluaran pemerintah (dan juga pembayaran transfer) dengan penerimaan (terutama dari pajak).”⁶

B. Kebijakan Fiskal dalam Perpektif Islam

Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah (melalui perpajakan pinjaman atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah). Kebijakan fiskal dalam suatu daerah tentulah diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

Anggaran belanja pada masa pemerintahan Islam adalah sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern.

⁶Noripin, *Ekonomi Moneter: Buku II*, ... hal. 97

Pendapatan negara yang masih baru ini beredar dari tahun ke tahun. Di masa awal pemerintahan Islam, dasar anggarannya adalah pengeluaran ditentukan oleh jumlah penghasilan yang tersedia dan ketika ini kebijakan anggaran belum berorientasi pada pertumbuhan. Konsep anggaran yang berlaku di masa ini adalah konsep anggaran berimbang dalam pengertian pengeluaran dan penerimaan negara adalah sama. Karena itu, pada masa awal pemerintahan Islam jarang terjadi defisit anggaran, karena pemerintah melakukan kebijakan pengeluaran berdasarkan pemasukan.

Kebijakan fiskal dan keuangan mendapat perhatian serius dalam tata perekonomian Islam sejak awal. Dalam negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan.

Bisa dikatakan, kebijakan fiskal memegang peran penting dalam sistem ekonomi Islam bila dibandingkan dengan kebijakan moneter. Adanya larangan tentang riba serta kewajiban tentang pengeluaran zakat menyiratkan tentang pentingnya kebijakan fiskal dibandingkan dengan kebijakan moneter. Larangan riba yang diberlakukan pada tahun Hijriah keempat telah mengakibatkan sistem ekonomi Islam yang dilakukan oleh Nabi terutama bersandar pada kebijakan fiskalnya saja. Sementara itu, negara Islam yang dibangun oleh Nabi tidak mewarisi harta sebagaimana layaknya dalam pendirian suatu negara. Oleh karena itu, kita akan mampu

melihat bagaimana kebijakan fiskal sangat memegang peranan penting dalam membangun negara Islam tersebut.

Pada masa kenabian dan kekhalifahan setelahnya, kaum muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrument sebagai kebijakan fiskal, yang diselenggarakan pada lembaga baitulmaal (*national treasury*). Dari berbagai macam instrument, pajak diterapkan atas individu (*jizya dan pajak khusus muslim*), tanah *Kharaj*, dan *ushur* (cukai) atas barang impor dari negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum muslimin, sehingga tidak memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat. Pada saat perekonomian sedang krisis yang membawa dampak terhadap keuangan negara karena sumber-sumber penerimaan terutama pajak merosot seiring dengan merosotnya aktivitas ekonomi maka kewajiban-kewajiban tersebut beralih kepada kaum muslimin. Semisal krisis ekonomi yang menyebabkan warga negara jatuh miskin otomatis mereka tidak dikenai beban pajak baik *jizya* maupun pajak atas orang Islam, sebaliknya mereka akan disantuni negara dengan biaya yang diambil dari orang-orang muslim yang kaya. (Nasution, *et al*, 2006)

Allah SWT mengingatkan kita tentang betapa sangat urgennya masalah distribusi harta ini dalam firman-Nya QS. Al-Hasyr: 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ

الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ^ج وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ^ع
فَاتَّقُوا اللَّهَ^ط وَأَتَّقُوا اللَّهَ^ج إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya amat keras hukumannya.” (QS. Al-Hasyr:7)

Juga dalam hadist Nabi SAW: “ jika pada suatu pagi di suatu kampung terdapat seseorang yang kelaparan, maka Allah berlepas diri dari mereka. “Dalam kesempatan lain” Tidak beriman kepada-Ku, orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara ia tahu tetangganya kelaparan.” (Hadist Qudsi)⁷

C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah wujud pengelolaan keuangan daerah yang setiap tahunnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”⁸ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Jadi, pendapatan daerah dapat didefinisikan sebagai semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam

⁷Nurul Huda, *et al*, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2009), Ed. 1, Cet. 2, hal.154-156

⁸Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, hal.293

periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan daerah berasal dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah
- 2) Dana perimbangan, dan
- 3) Pendapatan lain yang sah

2. Belanja

Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dapat diartikan sebagai semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi euitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan, yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah daerah.

Belanja daerah terdiri dari:

- 1) Belanja Tidak Langsung
 1. Belanja pegawai
 2. Belanja hibah
 3. Belanja bantuan sosial
 4. Belanja bagi hasil kepada Kab/Kota
 5. Belanja bantuan keuangan kepada Kab/Kota
 6. Dana pemerintah kota
 7. Belanja tidak terduga
 8. Belanja pilkada

2) Belanja Langsung

1. Belanja pegawai
2. Belanja barang dan jasa
3. Belanja modal

3. Pembiayaan

Pembiayaan dalam APBD atau disebut pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu diayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan dalam APBD atau pembiayaan daerah dapat didefinisikan sebagai transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

D. Inflasi

1. Definisi Inflasi

Menurut Noripin, yang dimaksud “Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus”.⁹Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan. Yang penting terdapat kenaikan harga umum barang secara terus-menerus selama suatu periode tertentu. Kebaikan yang terjadi hanya sekali saja

⁹Noripin, *Ekonomi Moneter: Buku II*, ... hal. 25

(meskipun dengan persentase yang cukup besar) bukanlah merupakan inflasi.

Menurut Rozalinda, “Inflasi adalah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung terus-menerus.”¹⁰ Kenaikan harga tersebut dimaksudkan bukan terjadi sesaat. Dari pengertian tersebut, maka apabila terjadi kenaikan harga hanya bersifat sementara, tidak dapat dikatakan inflasi. Misalnya, harga barang-barang naik menjelang lebaran atau hari libur lainnya. Karena ketika lebaran usai harga barang kembali ke kondisi semula, maka harga seperti itu tidak dianggap sebagai inflasi.

Secara umum, inflasi rendah masih dapat diterima, bahkan dalam tingkat tertentu bisa mendorong perkembangan ekonomi. Misalnya di Banten mengalami inflasi tiga persen. Dengan inflasi tersebut, berarti harga barang naik tiga persen. Keadaan tersebut mendorong produsen untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka (sesuai hukum penawaran, apabila harga barang/jasa naik maka produsen akan menambah jumlah barang/jasa yang ditawarkan). Dengan harga yang semakin tinggi, menjadikan pendapatan produsen meningkat. Selain itu, peningkatan biaya produksi tidak secepat kenaikan harga. Dengan demikian, kenaikan harga produk berarti juga mendorong peningkatan laba produsen. Di sisi lain, inflasi yang rendah menyebabkan daya beli masyarakat turun, tetapi tidak signifikan. Mungkin sebagian penduduk tidak

¹⁰Rozalinda, *Ekonomi Islam: (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*, ...hal. 298

merasakan kenaikan harga. Akibatnya mereka tidak mengurangi belanja/konsumsinya.

Sebaliknya, inflasi yang terlalu tinggi dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi. Karena dari sisi permintaan menyebabkan daya beli masyarakat menurun drastis, sehingga berdampak pada berkurangnya konsumsi masyarakat.

Idealnya inflasi dihitung berdasarkan kenaikan semua harga barang dan jasa. Tetapi karena masalah kepraktisan, penghitungan inflasi didasarkan atas sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan 744 komoditas yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi 7 kategori, sebagai berikut : 1) Bahan makanan, 2) Makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, 3) Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, 4) Sandang, 5) Kesehatan, 6) Pendidikan, rekreasi, dan olah raga, 7) Transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

Kenaikan harga ini diukur dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK). "IHK adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli masyarakat dalam satu periode tertentu."¹¹ IHK diperoleh dengan menghitung harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹¹Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, ... hal. 99

$$\text{Inflasi} = \frac{(\text{IHK} - \text{IHK}_{-1})}{\text{IHK}_{-1}} \times 100\%$$

2. Jenis Inflasi Menurut Sifatnya

Laju inflasi dapat dibedakan antara satu negara dengan negara lain atau dalam satu negara untuk waktu yang berbeda. Atas dasar besarnya laju inflasi, inflasi dapat dibedakan ke dalam tiga kategori antara lain sebagai berikut:

1) Inflasi merayap (*creeping inflation*)

Creeping inflation biasanya ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% pertahun). Kenaikan harga berjalan secara lambat, dengan persentase yang kecil serta dalam jangka relatif lama.

2) Inflasi menengah (*galloping inflation*)

Inflasi menengah biasanya ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (10%-30%) dan kadang-kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Artinya, harga-harga minggu/bulan ini lebih tinggi dari minggu/bulan lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat daripada inflasi yang merayap.

3) Inflasi tinggi (*hyper inflation*)

Merupakan inflasi yang paling parah akibatnya (30%-100%), harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan

uang. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang makin cepat, harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja (misalnya ditimbulkan oleh adanya perang) yang dibelanjai/ditutup dengan mencetak uang.

Berdasarkan teori di atas kondisi inflasi di Banten termasuk ke dalam jenis inflasi merayap karena pada dasarnya di Banten mengalami kenaikan inflasi yang bisa dikatakan normal, karena setiap tahunnya inflasi mengalami kenaikan atau turun pada tingkat kenormalan yaitu di bawah 10%.

3. Jenis Inflasi Menurut Sebabnya

Sebelum kebijaksanaan untuk mengatasi inflasi diambil, terlebih dahulu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya inflasi.

“Menurut teori kuantitas sebab utama timbulnya inflasi adalah kelebihan permintaan yang disebabkan karena penambahan jumlah uang beredar,”¹² Antara lain:

1) *Demand-pull Inflation*

Inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total (aggregate demand), sedangkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh. Dalam keadaan hampir kesempatan kerja penuh, kenaikan permintaan total

¹²Noripin, *Ekonomi Moneter: Buku II, ...* hal. 28-30

disamping menaikkan harga juga menaikkan hasil produksi (output).

2) *Cost-push Inflation*

Berbeda dengan demand pull inflation, cost push inflation biasanya ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi. Keadaan ini timbul biasanya dimulai dengan adanya penurunan dalam penawaran total (aggregate supply) sebagai akibat kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi ini dapat timbul karena beberapa faktor diantaranya:

- a) Perjuangan serikat buruh yang berhasil untuk menuntut kenaikan upah.
- b) Suatu industri yang sifatnya monopolistis, manager dapat menggunakan kekuasaannya di pasar untuk menentukan harga (yang lebih tinggi).
- c) Kenaikan harga bahan baku industri. Salah satu contohnya adalah krisis minyak yang terjadi pada tahun 1972-1973 yang mengakibatkan terjadinya kenaikan harga minyak. Biaya produksi naik, akibatnya timbul stagflasi, yakni inflasi yang disertai dengan stagnasi. Kenaikan biaya produksi pada gilirannya akan menaikkan harga dan turunnya produksi.

3) *Natural Inflation*

“Yaitu inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah, manusia tidak punya kuasa mencegahnya.”¹³Inflasi

¹³Rozalinda, *Ekonomi Islam: (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*, ...hal. 299-302

ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya penawaran agregat atau naiknya permintaan agregat. Ketika bencana alam terjadi berbagai bahan makanan, dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen sehingga persediaan barang-barang kebutuhan tersebut mengalami penurunan dan terjadi kelangkaan yang mengakibatkan harga-harga melambung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat. Untuk menanggulangi bencana ini, pemerintah mengeluarkan dana besar yang mengakibatkan perbendaharaan menjadi berkurang secara drastis atau defisit anggaran.

4) *Human Error Inflation*

Yaitu inflasi yang terjadi karena kesalahan manusia. Inflasi yang disebabkan oleh human error inflation terjadi karena:

- a) *Corruption and bad administration* (korupsi dan buruknya administrasi)
- b) *Excessive tax* (pajak yang tinggi)
- c) *Excessive seignore* (percetakan uang berlebihan)